

KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK



Risna Dewi, S.Sos., M.S.P
Depita Kardiati, M.Si

KAPITA SELEKTA ●●●●●●●● **ADMINISTRASI PUBLIK**

Risna Dewi, S.Sos., M.S.P
Depita Kardiati, M.Si



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK

Copyright @ 2026 Risna Dewi, S.Sos., M.S.P & Depita Kardiati, M.Si

All right reserved

Penulis

Risna Dewi, S.Sos., M.S.P

Depita Kardiati, M.Si

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-311-5

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi + 265 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Kapita Selekta Administrasi Publik ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya akademik dalam memperkaya literatur pembelajaran pada Program Studi Administrasi Publik.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut aparatur dan akademisi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, kritis, dan kontekstual terhadap berbagai isu kontemporer. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran konseptual sekaligus analisis terhadap berbagai tema strategis dalam administrasi publik, baik dari perspektif teoritis maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini dirancang secara sistematis agar dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa dalam memahami isu-isu pilihan (*selected issues*) dalam administrasi publik. Materi yang disajikan tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tetapi juga mendorong kemampuan analisis, sintesis, serta refleksi kritis terhadap fenomena kebijakan dan tata kelola publik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik sehingga buku ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa

buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi selanjutnya. Besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu administrasi publik.

Lhokseumawe, 25 Februari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB 1 TEORI ADMINISTRASI PUBLIK	1
1.1 Mengenal Administrasi Publik	1
1.2 Karakteristik Administrasi Publik dan Administrasi Negara	6
1.3 Konsentrasi Administrasi Publik	7
1.4 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik	13
1.5 Teori Klasik	22
1.6 Teori Behavioris	23
1.7 Teori Sistem	24
1.8 Teori Neo-Klasik	26
1.9 Teori Privatisasi	27
1.10 Teori Holistic Governance	30
BAB 2 FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK	35
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat	35
2.2 Hubungan Filsafat dengan Administrasi Publik	38
2.3 Urgensi Filsafat dalam Kajian Administrasi Publik	43
2.4 Ontologi Administrasi Publik	47
2.5 Epistemologi Administrasi Publik	50
2.6 Aksiologi dalam Administrasi Publik	53
2.7 Studi Kasus: Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Nilai-Nilai Filsafat di Kota Surabaya	57

BAB 3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK	59
3.1 Konsep Dasar Inovasi Pelayanan Publik	59
3.2 Pilar-Pilar Inovasi Pelayanan Publik	77
3.3 Tantangan dalam Inovasi Pelayanan Publik	81
3.4 Tantangan Inovasi Pelayanan Publik	82
3.5 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital	83
BAB 4 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	89
4.1 Konsep Manajemen Pelayanan Publik	89
4.2 Model Manajemen Pelayanan Publik	107
4.3 Tujuan Manajemen Pelayanan Publik	109
4.4 Manfaat Manajemen Pelayanan Publik	110
4.5 Sistem Manajemen Pelayanan Publik	111
4.6 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pelayanan Publik	113
4.7 Manajemen Pelayanan pada Sektor Publik dan Swasta	114
4.8 Studi Kasus Manajemen Pelayanan Publik (Pelayanan Sistem Rujukan Online Bagi Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Muara Barat Kabupaten Pidie)	116
4.9 Hasil dan Pembahasan: Pelayanan Sistem Rujukan Online Bagi Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Mutiara Barat Kabupaten Pidie	116
BAB 5 E-GOVERNMENT	121
5.1 Penerapan E-Goverment dalam Pelayanan Publik	127
5.2 Tantangan dan Solusi	130
5.3 Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia	131
5.4 Solusinya	133
5.5 Model E-Goverment	135
5.6 Implementasi E-Goverment di Indonesia	140
5.7 Manfaat	145
BAB 6 KEBIJAKAN PUBLIK	147
6.1 Pengertian dan Konsep Dasar Kebijakan Publik	147

BAB 7 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK	177
7.1 Definisi Etika Administrasi Publik	177
7.2 Prinsip Etika Administrasi Publik	179
7.3 Pendekatan Etika Administrasi Publik	183
7.4 Pendidikan Moral dalam Meningkatkan Moral dan Etika Generasi Muda di Indonesia	185
7.5 Etika Birokrasi dalam Memberikan Pelayanan Publik	186
7.6 6 Tantangan Etika dalam Kebijakan Publik	190
7.7 Permasalahan dalam Etika Administrasi Publik	193
7.8 Etika Administrasi Publik dan Maladministrasi	195
BAB 8 REFORMASI BIROKRASI	199
8.1 Definisi Reformasi Birokrasi	199
8.2 Sejarah Reformasi Birokrasi	207
8.3 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi	211
8.4 Strategi dan Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	213
8.5 Tantangan Reformasi Birokrasi	216
8.6 Konsekuensi Reformasi Terhadap Perilaku Birokrat dan Pelayanan Publik di Indonesia	222
BAB 9 COLLABORATIVE GOVERNANCE	225
9.1 Pemahaman Tentang Collaborative Governance	225
9.2 Pendekatan Collaborative Governance	233
9.3 Tantangan Collaborative Governance	237
9.4 Model Collaborative Governance	239
9.5 Kriteria Kesuksesan dan Kegagalan Collaborative Governance	245
9.6 Studi Kasus Terkait Collaborative Governance “Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe”	250
DAFTAR PUSTAKA	253
PROFIL PENULIS	263

BAB 1

TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

1.1 Mengenal Administrasi Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan konsep administrasi publik dengan kompatibel, mencakup berbagai elemen penting yang menjadi konsentrasi dan berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, implementasi, hingga kepada evaluasi kebijakan untuk publik. Sebagai bidang ilmu sosial yang implementasinya menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan, administrasi publik memiliki beberapa fokus konsentrasi, mencakup kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen publik, organisasi publik, serta interaksi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Hal-hal yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (public services), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya, administrasi publik lebih berkenaan dengan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik.

Administrasi publik sebagai *the work of government* memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Administrasi publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada cara pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam kerangka pemerintahan. Istilah ini berasal dari dua kata yaitu "administrasi" yang berarti proses pengelolaan atau pelaksanaan, dan "publik" yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebagai bidang studi, administrasi publik memusatkan perhatian pada bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga publik menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan efisien, adil, dan bertanggung jawab (Rosenbloom, 2019).

Salah satu daya tarik topik administrasi publik adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan politik yang terus-menerus. Administrasi publik di era digitalisasi seperti saat ini tidak hanya berkonsentrasi pada pengelolaan kebijakan konvensional, tetapi juga menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi layanan publik. Misalnya, analisis big data dan pengambilan keputusan memungkinkan pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan semakin bergantung pada pendekatan kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Oleh karena itu, administrasi publik tidak hanya membantu dalam pengelolaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan yang proaktif yang membantu mengubah masyarakat.

Definisi administrasi publik dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan para ahli. Dwight Waldo, seorang tokoh terkenal di bidang ini, mendefinisikan administrasi publik sebagai perpaduan antara seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik. Seni di sini mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan membuat keputusan dalam situasi yang kompleks, sementara ilmu mengacu pada penerapan metode ilmiah dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah publik (Waldo, 2007).

Administrasi publik tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai gabungan antara seni dan ilmu seperti yang diungkapkan oleh Dwight Waldo. Era yang serba menekankan kompleksitas saat ini, administrasi publik perlu dipandang sebagai ruang yang adaptif yang memerlukan kepekaan terhadap nilai (sebagai jenis seni), ketelitian analitis (sebagai elemen ilmu), dan kemampuan kontekstual untuk menanggapi perubahan sosial dan teknologi. Secara eksplisit, Dwight Waldo menegaskan administrasi publik memiliki sifat situasional dan reflektif, di mana praktiknya harus mampu mengimbangi pendekatan rasional dengan pendekatan kemanusiaan dalam konteks lokal yang khusus. Pendekatan ini memperluas arti seni dan ilmu ke dalam aspek etika, empati, serta inovasi dalam kebijakan, sehingga relevan untuk direalisasikan dalam pemerintahan. Di sisi lain, administrasi publik lebih dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang rasional dalam konteks organisasi publik (Keban, 2004).

Administrasi publik tidak lagi hanya dianggap sebagai kegiatan mengatur atau menjalankan kebijakan, tetapi lebih sebagai proses membuat keputusan yang logis dan masuk akal di dalam organisasi pemerintah. Ini berarti, fokus utamanya adalah bagaimana memilih pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional dan terukur. Administrasi publik merupakan proses pengambilan keputusan yang rasional dalam organisasi publik. Kondisi birokrasi saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, proses pengambilan keputusan tidak hanya dituntut rasional secara teknokratik (berdasarkan keahlian, logika, dan data), tetapi juga harus responsif terhadap dinamika sosial, partisipatif, serta berbasis data real-time.

Dewasa ini, pengambilan keputusan dalam birokrasi perlu mengintegrasikan pendekatan *e-governance*, big data analytics, dan kolaborasi multi-aktor untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya rasional secara internal, tetapi juga adaptif terhadap perubahan eksternal. Dengan demikian, administrasi publik masa kini tidak cukup hanya mengandalkan rasionalitas klasik, melainkan harus berkembang menjadi proses yang lebih inklusif,

transparan, dan agile (adaptif terhadap perubahan). Administrasi publik sebagai proses pengelolaan urusan pemerintah yang mencakup kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik (White, 1955).

Adanya keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, saat ini administrasi publik tidak bisa lagi dipahami sebagai proses yang kaku dan birokratis. Administrasi publik harus dilihat sebagai proses timbal balik yang menekankan pentingnya kerja sama antar sektor, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Fungsi-fungsi administratif perlu disesuaikan dengan model tata kelola yang melibatkan partisipasi dan berbasis data, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar. Administrasi publik terdiri dari tiga elemen utama: kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Kebijakan publik merujuk pada serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, 2023).

Meskipun secara konseptual administrasi publik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik, tantangan birokrasi saat ini menuntut integrasi yang lebih dinamis di antara ketiganya. Dalam konteks transformasi digital, transparansi, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi, kebijakan publik tidak lagi cukup hanya disusun secara top-down oleh elit pemerintah. *Co-creation* (proses kolaborasi antar-pemerintah) dalam perumusan kebijakan, di mana partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta analisis data real-time menjadi faktor kunci sangat digalakkan. Hal ini menuntut manajemen publik yang agile dan pelayanan publik untuk berorientasi pada pengalaman pengguna (*user-centered*). Oleh karena itu, ketiga elemen administrasi publik harus bergerak secara sinergis dalam ekosistem tata kelola yang terbuka, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Cakupan segala hal dari perumusan hingga penerapan kebijakan bertujuan untuk mengatasi masalah publik, seperti

kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Manajemen publik berfokus pada bagaimana kebijakan- kebijakan ini diimplementasikan oleh berbagai lembaga pemerintah. Proses ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan publik tercapai dengan efisien dan efektif. Pelayanan publik adalah hasil akhir dari proses administrasi publik, di mana layanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Perlu diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementerian) dan nondepartemen. Apabila kehidupan manusia menjadi makin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah juga akan makin kompleks. Cakupan yang dinamis ini dapat dipelajari dari berbagai literatur, khususnya buku-buku teks administrasi publik. Asumsinya, bidang dan isu yang ditulis dalam buku-buku teks tersebut relatif kontemporer dan elementer untuk diperhatikan, baik oleh akademisi maupun praktisi administrasi publik. Chandler dan Plano (1988:3) dalam (Carpenter, 1994).

Pengembangan pendekatan analisis dinamis terhadap kompleksitas administrasi publik dapat ditinjau melalui pemetaan isu-isu kontemporer menggunakan metode bibliometrik dan machine learning pada literatur administrasi publik. Kontribusi baru dapat hadir pula dengan mengidentifikasi pergeseran tematik dan tren permasalahan publik secara dinamis seiring berjalannya waktu. Hal ini memungkinkan akademisi dan praktisi untuk merespons dinamika sosial-politik dengan lebih adaptif dan berbasis data, bukan hanya mengandalkan asumsi normatif dari buku teks.

1.2 Karakteristik Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Pertumbuhan studi administrasi negara sudah bergeser dari penekanannya, yaitu *administration of public* yang menjadikan negara menjadi wakil sendiri untuk mengimplementasikan tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan. Tugas kenegaraan atau pemerintahan pada *public service* diubah menjadi *administration by public* yang berfokus kepada *public demand are differentiated*, maknanya adalah sebagai tugas kenegaraan atau pemerintahan yang hanya menjadi penyedia fasilitas, serta mengkatalisasi dengan fokus terhadap *putting the customers in the driver seat*, bukan menjadi penyebab ataupun yang berperan pokok menjadi *driving forces*. Perubahan-perubahan yang ada di pengertian public, yakni dari negara ke arti publik selaku masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik Administrasi Publik dan Administrasi Negara

No	Administrasi Negara	Administrasi Publik
1.	Mengedepankan nilai urgensi dalam melayani masyarakat	Administrasi publik harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada satu aliran, kelompok/golongan dan partai politik Tertentu
2.	Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh administrasi negara biasanya digantungkan kepada masukan	Menjalankan prinsip skala prioritas: mengutamakan yang paling dibutuhkan masyarakat pada bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan bencana,
	masyarakat yang diberikan pelayanan	mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
3.	Melayani masyarakat dengan mengacu pada regulasi hukum peraturan	Menjadi suatu keharusan dan tidak dapat dihindari serta selalu dibutuhkan oleh

	perundang-undangan serta peraturan yang ada	manusia dalam bidang kehidupan manusia baik sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan
4.	Ditetapkan oleh upaya yang ingin mengabdikan terhadap masyarakat secara Menyeluruh	Mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan publik

Sumber: (Widanti, 2022).

Berdasarkan karakteristik diatas, Widanti meyakini, bahwasanya ciri- ciri administrasi negara menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada urgensi kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika sosial yang cepat, administrasi negara perlu bergerak dari model birokrasi yang kaku menuju sistem yang tanggap terhadap kebutuhan mendesak, partisipatif dalam perumusan kebijakan, serta patuh pada prinsip-prinsip hukum untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas. Pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam menjawab aspirasi masyarakat. Sementara itu, administrasi publik harus membebaskan diri dari pengaruh politik sempit agar setiap kebijakan mencerminkan kepentingan bersama, bukan kelompok tertentu.

Administrasi publik dituntut untuk mengutamakan layanan di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan kebencanaan secara inklusif dan profesional. Dengan memadukan berbagai elemen, maka kebijakan, Sumber Daya Manusia, keuangan, dan hukum-secara sinergis, administrasi publik dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan tata kelola yang adil, efisien, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan zaman.

1.3 Konsentrasi Administrasi Publik

Disiplin yang terus berkembang, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana

tata kelola pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Perkembangan teori dan praktik administrasi publik telah melahirkan berbagai pendekatan dan pemikiran yang memperkaya pemahaman terhadap dinamika birokrasi dan pelayanan publik. Disiplin ilmu administrasi publik mencakup beberapa konsentrasi yang menjadi acuan untuk diimplementasikan oleh berbagai aktor ataupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Melalui perkembangan paradigma dari masa ke masa, konsentrasi dalam ranah administrasi publik mencakup empat konsentrasi, yaitu:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang dalam mengatasi suatu masalah maupun persoalan. Baik buruknya tindakan yang ditetapkan seseorang juga disebut dengan kebijakan. Menurut Chandler dan Plano dalam (Dong, 2021), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik hadir sebagai acuan para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Pengembangan pendekatan kolaboratif dalam formulasi kebijakan publik menggabungkan perspektif masyarakat secara langsung melalui teknologi digital partisipatif (misalnya pada platform e-governance). Disini, Chandler dan Plano menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi bagaimana keterlibatan warga secara komprehensif dapat meningkatkan akurasi identifikasi masalah publik serta efektivitas implementasi kebijakan, dibandingkan penggunaan pendekatan top-down tradisional yang hanya mengandalkan aktor birokrasi dan politisi. (Dr. Drs. Awan Abdoellah & Dr.Yudi Rusfiana, 2016) mendefenisikan "*public policy is a whatever governments choose to do or not to do*". Mereka juga memperjelas, bahwa kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak, dan bahwa keputusan

tersebut dibuat oleh sumberdaya manusia yang ada dalam pemerintahan atau lembaga pemerintahan.

Kebijakan publik adalah segala hal yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah menawarkan perspektif baru bahwa kebijakan tidak hanya merupakan hasil dari tindakan aktif pemerintah, tetapi juga dari ketidakaktifan. Inovasi yang bisa diambil dari pemikiran ini adalah pemahaman ulang mengenai non-kebijakan sebagai suatu jenis strategi kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, tidak terlibat atau memilih untuk tidak mencampuri isu publik tertentu bukan hanya sekadar merupakan kelemahan institusi, tetapi dapat ditafsirkan sebagai refleksi dari prioritas, ideologi, atau batasan sumber daya. Analisis tentang kebijakan publik seharusnya diperluas untuk mencakup bukan hanya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga motif, dampak, dan kemungkinan implikasi politik dari keputusan untuk tidak bertindak.

Kebijakan dapat digambarkan sebagai media, dimana isu-isu spesifik dari lintas sektor dapat diangkat selama masih dalam proses pembuatan kebijakan sebelum diintegrasikan ke dalam inisiatif organisasi yang lebih luas dan dapat dijangkau oleh semua tingkat pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Sehingga diketahui apakah itu bersifat sektoral, lintas spesifik, atau memenuhi target. Untuk mencapai kebijakan koherensi, koordinasi, dan harmoni, serta integrasi, pertimbangan kebijakan ke dalam bidang dan kegiatan terkait kebijakan terus ditingkatkan (Dewi & Ayuda, 2022).

Proses kebijakan berperan penting sebagai ruang strategis untuk mengidentifikasi, mengangkat, dan menyelaraskan isu-isu sektoral maupun lintas sektoral agar terkoordinasi dan terintegrasi secara optimal dalam sistem pemerintahan. Kontribusi ini penting terhadap studi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pencapaian policy coherence dan intersectoral governance, yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antar bidang, serta kemampuan mengelola kompleksitas sejak kebijakan masih dalam tahap perumusan.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu bagian dari pilar utama dalam administrasi publik. Pelayanan publik menjadi implementasi terakhir yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan publik mencakup segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus adil, transparan, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Frederickson, 2003).

Pelayanan publik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyoroti nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan responsif. Aspek ini dapat diarahkan kepada pengembangan model pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital dan mengkolaborasikan nilai-nilai tersebut secara langsung, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dan efisiensi pelayanan. Selain itu, sudut pandang ini menilai kualitas pelayanan publik dengan menggunakan indikator yang berfokus pada pengalaman pengguna, yang selama ini kurang diperhatikan dalam konteks administrasi publik yang biasa.

Pelayanan publik harus dikelola secara efisien dan efektif. Artinya, setiap pelayanan yang diberikan pada setiap instansi harus dilaksanakan dengan penuh perhatian, dengan biaya yang seefisien mungkin, namun tidak menghilangkan kualitas yang ada. Selain itu, pelayanan publik harus dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada kesenjangan, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berada pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Artinya, pelayanan publik merupakan kegiatan dalam hal melayani secara keseluruhan melalui aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya (Dewi & Alfiady, 2023).

Pelayanan publik tidak hanya dipahami perannya sebagai pemenuhan administratif semata, tetapi juga mencakup pemenuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan dasar

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perspektif ini menempatkan pelayanan publik sebagai hak masyarakat yang melekat, adil, dan bersifat esensial, yang artinya bukan hanya sekadar bentuk kewajiban negara yang prosedural.

3. Manajemen Publik

Manajemen publik berfokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik mengacu pada prinsip dasar manajemen, yaitu POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*). Artinya, sebelum kebijakan diimplementasikan, manajemen publik berperan untuk menilik apakah kebijaka telah terencana dan terorganisir sesuai ketentuan yang ada hingga kemudian diimplementasikan dan diawasi untuk dapat dievaluasi. Salah satu aspek penting dari manajemen publik adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, manajemen publik juga melibatkan pengelolaan anggaran pemerintah, di mana pejabat publik harus memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan kebijakan publik (Tanjung, 2022).

Manajemen publik juga meliputi pengelolaan dana pemerintah, di mana wewenang publik perlu memastikan bahwa dana yang tersedia dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kebijakan. Dari pernyataan ini, kita bisa menambahkan bahwa inovasi dalam manajemen publik harus mencakup pemanfaatan teknologi untuk memantau pengeluaran anggaran secara langsung. Dengan demikian, pejabat publik dapat lebih cepat mendeteksi masalah dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga anggaran dapat dipergunakan dengan optimal demi kepentingan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan anggaran juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga semua pihak merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang manajerial, nilai tambah dapat mengarah pada perubahan, seperti dengan melakukan kegiatan organisasi, telah menunjukkan adanya perkembangan manajemen

orgaisasi dari masa ke masa. Seorang pemimpin yang berperan sebagai entrepreneur harus memiliki karakter yang memiliki keberanian mengambil resiko, menyukai tantangan, punya daya tahan yang tinggi punya visi jauh ke depan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik Peningkatan kualitas suatu organisasi mengharuskan meningkatnya pemahaman terhadap tatakelola organisasi (Nuriman et al., 2023).

Nilai tambah dalam manajemen organisasi bukan hanya dihasilkan melalui efisiensi atau struktur birokrasi, namun bisa pula melalui kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berani mengambil risiko. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola manajemen tradisional menuju model manajemen yang dinamis dan berorientasi kepada inovasi. Selain itu, penekanan pada pentingnya pemahaman terhadap tata kelola organisasi sebagai prasyarat peningkatan kualitas menjelaskan, bahwa transformasi organisasi modern harus ditopang oleh pemimpin yang mampu mengelola perubahan secara strategis dan berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

4. Organisasi Publik

Organisasi publik adalah organisasi yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan organisasi publik, perlu menerapkan nilai-nilai publik dalam berorganisasi, seperti integritas, transparansi, dan akuntabel untuk membentuk perilaku birokrat dan institusi publik yang lebih baik. Dalam ranah administrasi publik, nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku birokrat dan lembaga publik (Goss, 1996).

Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting dalam membentuk sikap para birokrat serta organisasi publik. Kita dapat menambahkan bahwa demi meningkatkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Contohnya, platform daring yang memungkinkan warga untuk mengakses laporan keuangan dan kinerja instansi publik secara langsung. Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya akan mendorong para birokrat untuk lebih bertanggung jawab dan menjaga kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

1.4 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Terjadinya pergeseran dari paradigma satu ke paradigma lain, bukan tanpa sebab. Setiap kali munculnya paradigma baru, tentu ada masalah dengan paradigma sebelumnya. Apabila sepanjang karya-karya yang dihasilkan (termasuk teori) yang berakumulasi pada dukungan terhadap paradigma, maka ilmu pengetahuan tersebut berada pada kondisi normal. Tetapi apabila di suatu masa ditemukan karya-karya yang membuahkan penyimpangan yang tidak dapat dijelaskan dengan paradigma yang ada, maka kondisi inilah disebut anomalies. Kondisi anomalies ini kemudian membuat orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada dan berusaha membangun paradigma baru. Ketika orang mulai tidak percaya dengan paradigma lama, dan berusaha menemukan/membangun dan beralih ke paradigma baru, maka kondisi inilah yang oleh Thomas Khun (1993) sebut sebagai “Revolusi Sains”. Setelah revolusi orang akan menemukan paradigma baru dengan dukungan teori- teori baru, maka ilmu yang bersangkutan kembali ke kondisi normal. Thomas khun dalam (Imanuel Jaya, 2021).

Penegasan Thomas Kuhn mengenai revolusi sains menjadi sangat relevan dalam menganalisis dinamika perubahan paradigma dalam administrasi publik modern. Di tengah krisis kepercayaan publik, ketidakefektifan birokrasi konvensional, dan tekanan disrupsi digital, banyak elemen dalam sistem pemerintahan yang saat ini tengah berada dalam fase “anomali” sebagaimana dimaksud oleh Kuhn. Ketika pendekatan birokrasi lama (berbasis hierarki kaku dan prosedural) gagal menjawab

tantangan zaman yang kompleks dan cepat berubah, muncullah desakan untuk membangun paradigma baru dalam tata kelola publik.

1. Era New Public Administration

Munculnya *New Public Administration* diawali dengan beberapa kejadian, seperti pada tahun 1960-an, terjadi beberapa krisis secara bersamaan. Pertama, krisis kota yang bersumber dari sub-urbanisasi yang tidak bisa ditawar yang didukung pemerintahan. Kedua, krisis rasial yang amat erat berhubungan dengan krisis sebelumnya, untuk sebagian berasal dari getoisasi (perkampungan di kota yang umumnya dihuni oleh penduduk dari kelompok minoritas). Dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pulalah lembaga pelayanan masyarakat, tingkat pengangguran yang tak terkendali terutama di kalangan minoritas dan sistem kesejahteraan terlalu menanggung beban yang berat. Ketiga, terjadi krisis energi diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi dan seterusnya dan semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara.

Era *New Public Administration* (NPA) muncul pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan administrasi publik tradisional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan terhadap model birokrasi Weberian yang dianggap terlalu kaku dan tidak responsif terhadap masalah sosial yang mendesak, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi rasial. Dwight Waldo, salah satu tokoh utama dalam gerakan ini, dalam bukunya "*Public Administration in a Time of Turbulence*", menekankan perlunya administrasi publik untuk lebih fokus pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan partisipasi publik. *New Public Administration* (NPA) mengkritik pendekatan tradisional yang cenderung mengutamakan efisiensi dan netralitas administratif, dan mengusulkan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis

nilai. Dwight Waldo dalam (Dong, 2024).

Untuk meraih tujuan tersebut, administrasi publik harus menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Hal ini menekankan perlunya perhatian terhadap nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan partisipasi publik. Ini juga berarti melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, sehingga suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak serta kewajiban mereka, agar mereka lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan.

Di Indonesia, contoh penerapan sistem tradisional terlihat pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto, dimana secara birokratis dan administrative, pemerintahan terbatas pada seluruh kegiatan politik dan kedinasan. Jaringan organisasi sosial yang terjalin erat di sekitar lingkungan pegawai negeri dirancang untuk merangkul semua aspek kehidupan mereka. Selain itu, secara politis dan sosial setelah Orde Baru, masyarakat Indonesia dikecualikan dari kebebasan berekspresi dan memilih, semua kegiatan harus disetujui oleh pemerintah pusat dan militer (Alfiady et al., 2015).

Birokrasi dan tata kelola negara pasca era Orde Baru tidak hanya berperan dalam fungsi kedinasan, namun juga berfungsi sebagai pembentuk jejaring sosial yang mencengkeram kehidupan pribadi pegawai negeri. Hal ini mencerminkan kontrol negara yang meluas hingga ke ranah sosial dan menunjukkan bahwa struktur birokrasi Indonesia kala itu bukan sekadar alat administratif, melainkan bagian dari mekanisme kekuasaan politik yang membatasi ruang kebebasan individu dan kolektif. Secara khusus, disini menyoroti bagaimana dominasi negara, melalui birokrasi dan militer, membatasi partisipasi politik warga dan menundukkan ekspresi sosial dalam satu arah sentralistik.

2. Era New Public Management

Perspektif ini lahir pertama kali hadir di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis sebagaimana yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1996) dalam (Alamsyah Anggriani, 2016). Pertama, ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan, ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, melonjaknya biaya perawatan medis. Kedua, birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat. Ketiga, sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif. Keempat, kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik/pelanggan yang harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya. Dari semua masalah ini kemudian muncul krisis kepercayaan bangsa Amerika terhadap pemerintah, dan mengalihkan tema berbagai buku dari mengenai kebijakan negara ke pertumbuhan industri, sebagian besar berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Krisis multidimensi dalam pemerintahan, terutama ketidakefisienan birokrasi dalam menjawab tantangan sosial modern, lemahnya orientasi pelayanan, serta runtuhnya kepercayaan publik. Relevansi yang dapat diangkat dari kondisi tersebut adalah pentingnya redefinisi peran pemerintah dalam era digital dan pasca-industri: dari birokrasi sebagai "penguasa" regulasi menjadi platform kolaboratif yang memfasilitasi solusi bersama antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Paradigma birokrasi klasik yang bersifat tersentralisasi, hierarkis, dan prosedural tidak lagi memadai. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pengembangan model tata kelola adaptif dan desentralistik yang berbasis data, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Ini menuntut adanya digital governance, sistem

pelayanan publik berbasis AI, pendekatan design thinking dalam kebijakan, serta reformulasi peran birokrat sebagai fasilitator inovasi, bukan hanya pelaksana aturan.

Era *New Public Management* (NPM) muncul pada akhir 1980-an hingga 1990-an sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap birokrasi tradisional yang dianggap lamban, tidak efisien, dan terlalu birokratis. *New Public Management* (NPM) mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Christopher Hood (1991) adalah salah satu tokoh utama yang mempopulerkan konsep *New Public Management* (NPM) melalui artikelnya "*A Public Management for All Seasons?*". Dalam karyanya, Hood mendefinisikan *New Public Management* (NPM) sebagai kumpulan ide yang melibatkan desentralisasi, pemberdayaan manajer, fokus pada hasil, dan penggunaan teknik manajemen dari sektor swasta, seperti pengukuran kinerja, kompetisi internal, dan orientasi pada pelanggan. Ia juga berpendapat bahwa dengan menerapkan teknik-teknik ini, organisasi publik dapat menjadi lebih fleksibel, efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Christopher Hood, 1991 dalam Dong, 2024).

Serangkaian ide yang dicakup disini meliputi desentralisasi, pemberdayaan manajer, fokus pada hasil, dan penerapan teknik manajemen dari sektor swasta, seperti pengukuran kinerja, kompetisi internal, dan orientasi pada pelanggan. Meskipun *New Public Management* (NPM) memberikan banyak keuntungan, saat ini perlu ada penyesuaian untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen publik. Administrasi publik harus tidak hanya fokus pada efisiensi dan hasil, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dan merasa memiliki dalam proses pengambilan keputusan. Administrasi publik dapat

menciptakan nilai yang lebih besar dan relevan bagi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

Organisasi publik dapat menjadi lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. juga memprioritaskan pendekatan yang lebih empatik, yaitu peka dengan mendengarkan serta memahami harapan masyarakat. Menjalin hubungan yang baik antara pegawai pemerintah dan masyarakat, layanan yang disediakan tidak hanya akan efektif, tetapi juga berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Pendekatan *New Public Management* (NPM) menekankan pentingnya manajemen berbasis hasil (*results-oriented management*) di mana keberhasilan organisasi publik diukur berdasarkan kinerja dan pencapaian target tertentu. Ini berbeda dengan pendekatan birokrasi tradisional yang lebih fokus pada prosedur dan proses. *New Public Management* (NPM) juga mendorong penggunaan kontraktualisasi, di mana layanan publik dikelola melalui kontrak yang jelas antara pemerintah dan

penyedia layanan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

3. Era Collaborative Governance

Era *Collaborative Governance* muncul pada awal abad ke-21 sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah publik yang rumit. Don Kettl (2002) dalam bukunya "*The Transformation of Governance*" menyatakan bahwa tantangan-tantangan publik seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketidaksetaraan ekonomi membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (Ulber Silalahi & Wirman Syafri, 2015).

Pentingnya partisipasi beragam pemangku kepentingan dalam menangani tantangan publik, arah transformasi yang diperlukan saat ini adalah transisi dari sekedar kolaborasi menuju

model ko-produksi kebijakan yang berbasis teknologi digital. Menghadapi tantangan global yang semakin rumit dan berkaitan, seperti perubahan iklim, hoaks digital, dan gangguan ekonomi, partisipasi semua pihak harus didorong melalui platform yang terbuka, transparan, dan waktu nyata. Ini bukan sekadar mengenai siapa yang terlibat, melainkan tentang bagaimana mereka secara aktif berkolaborasi dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kebijakan publik dengan cara yang berkelanjutan.

Collaborative Governance adalah sebuah model di mana pemerintah bekerja secara kolaboratif dengan aktor non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, dan warga negara, untuk merumuskan kebijakan dan memberikan layanan publik. *Collaborative governance* mendorong terciptanya hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog yang berkelanjutan, berbagi informasi, dan kerja sama dalam menyusun solusi inovatif. Hal ini penting karena banyak masalah publik saat ini bersifat lintas sektoral dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi (Amru et al., 2023). Pendekatan ini selain juga membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, yang sering kali menjadi kunci keberhasilan kolaborasi dalam jangka panjang.

Konsep *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Bryson, Crosby, & Stone menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang solusi terhadap masalah publik. Pemerintahan tidak lagi dapat berjalan secara eksklusif dalam batas-batas institusionalnya dan harus bertransformasi menjadi entitas yang terbuka, adaptif, dan berbasis jejaring. Perlunya integrasi antara *collaborative governance* dengan kemampuan digital (*digital civic engagement*), partisipasi berbasis platform, dan data kolaboratif memungkinkan berbagai aktor termasuk warga, komunitas, akademisi, hingga pelaku industri untuk bersama-sama merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Ini memperluas

makna kolaborasi, tidak hanya sebagai hubungan interpersonal antar lembaga, tetapi juga sebagai arsitektur pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan berbasis ekosistem digital.

Proses *collaborative governance* bertujuan untuk menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, hadirnya peserta yang inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan kompeten dalam kemitraan masyarakat, metode musyawarah (*deliberative*) yang lebih baik, serta tertanamnya nilai akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah (Aisyah et al., 2024).

Penekanan terhadap *collaborative governance* sebagai pendekatan tata kelola tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, namun juga pada terjadinya transformasi relasi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas aktor dengan keterlibatan aktif, inklusif, dan deliberatif mampu membentuk masyarakat yang lebih terinformasi, berdaya, dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi publik. Pendekatan ini menggeser paradigma lama yang sentralistik menuju model partisipatif berbasis kemitraan dan tanggungjawab bersama.

4. Paradigma Postmodern (Postmodern Public Administration)

Paradigma Postmodern dalam administrasi publik menandai pergeseran dari pendekatan tradisional yang kaku dan hierarkis menuju pemahaman yang lebih fleksibel dan beragam dalam konteks pengelolaan publik. Dalam paradigma ini, realitas dianggap sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, identitas, dan kekuasaan. Postmodernisme mendorong pemikiran kritis terhadap struktur dan norma yang ada, serta menekankan pentingnya inklusivitas dan pluralisme dalam proses administrasi publik. Menurut Denhardt (2019), "administrasi publik postmodern berusaha untuk memahami dan menghargai keragaman pengalaman dan perspektif dalam masyarakat, dan mempromosikan dialog yang konstruktif antara berbagai pihak" (Amin, 2024).

Administrasi publik postmodern berusaha memahami dan menghargai keberagaman pandangan serta memfasilitasi dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, relevansi yang diperlukan saat ini adalah peralihan menuju administrasi publik yang deliberatif digital, yang tidak hanya mendukung dialog, tetapi juga memperluas ruang partisipasi dengan menggunakan teknologi yang inklusif. Di tengah keadaan polarisasi sosial dan informasi yang terpecah, administrasi publik perlu menciptakan ekosistem deliberatif yang adaptif, partisipatif, dan peka terhadap konteks budaya lokal, sambil memastikan suara kelompok marginal, tidak hanya didengarkan, tetapi juga berpengaruh nyata dalam proses pembuatan keputusan.

Salah satu ciri utama dari paradigma ini adalah penekanan pada kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan menciptakan ruang untuk dialog yang terbuka antara pemerintah dan warga, serta antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, paradigma postmodern juga mendorong inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis di era modern.

Paradigma postmodern menekankan pentingnya konteks lokal dan pengalaman hidup masyarakat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya. Paradigma ini juga menekankan pada pentingnya narasi dan wacana dalam membentuk realitas administrasi publik, mengakui bahwa setiap kebijakan merupakan hasil dari negosiasi nilai dan makna di antara berbagai aktor sosial. Postmodernisme mendorong para profesional administrasi publik untuk menghindari solusi "satu ukuran untuk semua" dan lebih fokus pada pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan reflektif dalam menghadapi masalah publik yang kompleks.

1.5 Teori Klasik

Teori Administrasi Publik Tradisional juga dikenal sebagai pendekatan klasik dalam administrasi publik, merupakan landasan teoritis yang berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori Klasik dalam administrasi publik mengacu pada pendekatan yang menekankan struktur, proses, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Teori ini sering kali merujuk pada kontribusi para pemikir awal seperti Max Weber dan Henri Fayol dalam (Nadjib, 2016), yang menekankan pentingnya hirarki dan pengaturan formal dalam organisasi.

Prinsip hierarki serta pengaturan formal yang diungkapkan oleh Max Weber dan Henry Fayol bisa diubah menjadi model hierarki adaptif, yaitu struktur organisasi yang tetap mempertahankan kejelasan peran dan tanggung jawab, juga membolehkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, kolaborasi antar fungsi, dan pemanfaatan teknologi sebagai pengganti sebagian mekanisme pengawasan birokratis yang tradisional.

Perkembangan pemikiran administrasi publik, pendekatan awal yang banyak digunakan adalah Teori Klasik, yang berfokus pada struktur organisasi, efisiensi kerja, dan pembagian tugas secara hierarkis. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan sistem birokrasi yang tertib, rasional, dan dapat diandalkan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Fokus utama teori ini adalah pada pencapaian efisiensi melalui standarisasi prosedur dan kejelasan wewenang. Seperti yang dinyatakan oleh Kettunen (2021), "Teori Klasik membantu membangun fondasi bagi administrasi publik dengan menekankan perlunya prosedur yang jelas dan pembagian kerja yang efisien". (Puncak Joyontono, 1967).

Di era pemerintahan digital dan layanan publik yang berdasarkan data, prinsip-prinsip teori klasik mengenai prosedur yang jelas dan pembagian kerja yang efisien perlu diperbarui menjadi desain proses dinamis, yakni sistem administrasi publik yang tetap mempertahankan kejelasan prosedur dan dapat

beradaptasi secara langsung terhadap perubahan kebutuhan masyarakat melalui otomatisasi, kecerdasan buatan, dan kolaborasi lintas sektor.

Penerapan Teori Klasik dalam administrasi publik terlihat dalam pengembangan struktur organisasi yang sistematis dan prosedural. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan lebih teratur, mengurangi tumpang tindih fungsi, dan meningkatkan komunikasi internal. Teori ini juga berkontribusi pada pemahaman mengenai otoritas dan tanggung jawab dalam konteks publik, di mana pentingnya kepemimpinan yang jelas menjadi krusial. Dengan demikian, konsep-konsep dari Teori Klasik masih relevan dalam konteks pengelolaan organisasi modern, yang sering kali menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat.

1.6 Teori Behavioris

Menurut Jann dan Wegrich, "Teori Behavioris memberikan perspektif yang lebih manusiawi dalam administrasi publik, menekankan pentingnya interaksi sosial dan motivasi individu dalam proses pengambilan keputusan" (Ulber Silalahi & Wirman Syafri, 2015).

Administrasi publik semakin terdampak oleh teknologi digital dan analisis data, maka dari itu, prinsip teori behavioris dapat diadaptasi menjadi pendekatan governance dan perilaku digital yang menjelaskan proses pengambilan keputusan publik yang tidak hanya memperhatikan interaksi sosial serta motivasi individu,

tetapi juga memanfaatkan data perilaku, algoritma prediktif, dan intervensi berbasis nudging (pendorong sistem) untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan empatik.

Teori Behavioris dalam administrasi publik berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami motivasi, interaksi, dan respons manusia sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Pendekatan Behavioris

membantu pemimpin dan manajer untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan memahami perilaku karyawan, pemimpin dapat merancang program pelatihan dan pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan. Selain itu, teori ini mendorong penciptaan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan inklusif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pendekatan ini tetap relevan dalam menciptakan dinamika organisasi yang adaptif.

Salah satu kontribusi utama pendekatan behavioris adalah penekanan pada komunikasi yang terbuka dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, manajer diharapkan untuk mendengarkan masukan dari karyawan dan melibatkannya dalam proses perencanaan. Dengan cara ini, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Pendekatan ini juga mengakui bahwa karyawan bukan sekadar sumber daya, melainkan individu dengan kebutuhan psikologis dan sosial yang kompleks. Melalui keterlibatan aktif karyawan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap tujuan organisasi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan motivasi, loyalitas, dan produktivitas kerja. Karyawan yang merasa dihargai cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dan berinisiatif untuk menyumbangkan ide-ide inovatif. Dalam administrasi publik, pendekatan behavioris sangat relevan untuk mendorong budaya kerja kolaboratif dan humanistik, yang tidak hanya memperkuat hubungan internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

1.7 Teori Sistem

Teori Sistem memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas administrasi publik dengan memfokuskan perhatian pada interaksi dan proses yang

menghubungkan elemen-elemen dalam suatu sistem (Ismaya et al., 2022). Pemerintahan saling terkait dan terhubung, Teori Sistem dapat diperluas menjadi pendekatan ekosistem pemerintahan kolaboratif', sebuah paradigma yang tidak hanya mengamati interaksi internal antar elemen sistem administrasi, tetapi juga menekankan keterkaitan dinamis antara aktor negara, non-negara, teknologi, dan masyarakat dalam menciptakan nilai publik secara bersama dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan teknologi digital dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, ekosistem ini mampu menjawab tantangan pemerintahan modern yang bersifat kompleks, seperti masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pendekatan ini menempatkan pemerintahan sebagai platform terbuka yang memfasilitasi inovasi bersama, pembelajaran adaptif, dan responsivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, sehingga memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik di era digital.

Teori Sistem dalam administrasi publik menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai organisasi sebagai entitas yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami dinamika dalam administrasi publik, penting untuk menganalisis hubungan dan interdependensi antara berbagai elemen, baik internal maupun eksternal. Pada konteks administrasi publik, penerapan Teori Sistem memungkinkan pengelola untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang holistik. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antar lembaga dan sektor, karena masalah yang dihadapi sering kali bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektoral. Penerapan teori ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu keuntungan dari pendekatan sistem adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda dalam organisasi. Hal ini memungkinkan manajer untuk lebih baik dalam mengantisipasi

perubahan dan mengadaptasi strategi sesuai dengan dinamika yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antar departemen dan tim, sehingga menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mengadopsi pendekatan sistem, organisasi dapat menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam manajemen dan pengambilan keputusan.

1.8 Teori Neo-Klasik

Teori Neo-Klasik membahas pentingnya memahami kebutuhan dan motivasi karyawan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut arsip (Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, 1995), "Teori Neo-Klasik memberikan perspektif yang lebih holistik dalam administrasi publik, menekankan bahwa manusia adalah bagian integral dari organisasi yang memerlukan perhatian khusus".

Teori Neo-Klasik bisa dilanjutkan menjadi pendekatan governance adaptif yang berpusat pada manusia, yaitu model administrasi publik yang tidak hanya mengakui peran manusia secara menyeluruh dalam organisasi, tetapi juga menyusun kebijakan, struktur kerja, dan teknologi dengan mengedepankan empati, kesejahteraan emosional, serta kebutuhan adaptif individu di lingkungan kerja yang senantiasa berubah. Integrasi antara prinsip-prinsip humanistik dari Teori Neo-Klasik dengan kerangka kerja adaptif berkesinambungan satu sama lain, di mana organisasi publik mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal, sambil tetap menjaga keseimbangan internal berbasis kemanusiaan. Mengedepankan kebutuhan pegawai sebagai manusia seutuhnya (bukan hanya sumber daya), pendekatan ini membuka jalan bagi pembentukan birokrasi yang lebih sehat, inklusif, inovatif, dan pada akhirnya lebih efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di era disrupsi.

Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial, komunikasi, dan faktor psikologis dalam memengaruhi perilaku

individu di dalam lingkungan kerja. Pada konteks administrasi publik, penerapan Teori Neo-Klasik memungkinkan manajer untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan kolaboratif. Memfokuskan perhatian pada hubungan antar individu, organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang berujung padapeningkatan kinerja. Memberikan ruang bagi dinamika sosial dalam organisasi, pendekatan ini membantu menciptakan suasana kerja yang lebih sehat dan produktif. Hubungan yang baik antar individu, kejelasan peran, serta adanya umpan balik yang konstruktif mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan kepuasan kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Konteks birokrasi modern yang dihadapkan pada tuntutan transparansi dan akuntabilitas, pendekatan ini relevan untuk membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja, sehingga administrasi publik dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih manusiawi dan efektif. Salah satu keuntungan dari pendekatan neo-klasik adalah fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis. Memanfaatkan pendekatan ini, manajer dapat menyesuaikan strategi dan struktur organisasi agar sesuai dengan situasi yang dihadapi, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Pendekatan ini juga mendorong pemikiran kritis dan analitis dalam pengambilan keputusan, karena manajer dituntut untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Pendekatan kontingensi mendukung pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif.

1.9 Teori Privatisasi

Teori Privatisasi ini merupakan awal dari pertanda munculnya *New Public Management* (NPM), namun tidak dikaji secara bersamaan dalam periode *New Public Management* (NPM) (Akbar, 2015). Pengakuan bahwa Teori Privatisasi sebenarnya merupakan fondasi awal lahirnya paradigma *New Public Management* (NPM), namun tidak selalu dikaji secara terpadu

dalam konteks dan periode yang sama. Hal ini membuka ruang refleksi baru bahwa meskipun privatisasi sebagai instrumen efisiensi telah diterapkan lebih dahulu, pendekatan *New Public Management* (NPM) sebagai kerangka manajerial yang lebih komprehensif baru hadir belakangan untuk memberikan arah strategis yang lebih sistematis terhadap reformasi sektor publik. Relevansi dengan kondisi saat ini sangat kuat, terutama ketika banyak pemerintahan menghadapi tekanan fiskal, tuntutan efisiensi, dan desakan terhadap kualitas layanan publik.

Di era digital dan pasca-pandemi, privatisasi dan pendekatan *New Public Management* (NPM) tidak cukup bila diterapkan secara terpisah. Diperlukan rekontekstualisasi kedua konsep ini secara integratif, terutama dengan menyesuakannya pada tata kelola kolaboratif, nilai-nilai publik, dan akuntabilitas sosial yang lebih luas. Negara tidak hanya menjadi regulator atau operator, tetapi juga menjadi enabler dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Privatisasi adalah proses pengalihan pengelolaan fungsi atau layanan dari sektor publik kepada sektor swasta. Privatisasi dapat melibatkan kontrak layanan, penjualan aset publik, atau pengalihan pengelolaan layanan tanpa transfer kepemilikan (Maro'ah, 2008).

Privatisasi tidak selalu berarti penyerahan penuh kepemilikan, tetapi bisa berbentuk berbagai model kemitraan seperti kontrak layanan, konsesi, atau pengelolaan bersama, sebagaimana dijelaskan oleh Savas, ini menandai pergeseran penting dari pandangan privatisasi tradisional sebagai pelepasan aset menuju mekanisme kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Relevansinya saat ini sangat apik, terutama di tengah tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih gesit, efisien, dan responsif dalam menghadapi keterbatasan fiskal, kebutuhan inovasi, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Savas lebih lanjut membagi privatisasi menjadi beberapa jenis, seperti:

- a. Privatisasi Aset: transfer atau penjualan kepemilikan aset milik negara kepada sektor swasta.
- b. Privatisasi Layanan: mengalihkan penyediaan layanan tanpa transfer kepemilikan aset.
- c. Privatisasi Kontrak: pemerintah mengontrak sektor swasta untuk mengelola layanan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah.
- d. Privatisasi Kompetisi: menggunakan mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi, termasuk penciptaan pasar kompetitif di mana sektor swasta bersaing untuk menyediakan layanan.

Dapat dilihat, bahwa dari aspek persaingan, hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan karena perusahaan swasta berusaha untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Memanfaatkan aktor swasta, maka pemerintah dapat lebih fokus pada fungsi-fungsi inti dan strategis, sementara layanan non-inti dikelola oleh sektor swasta. Di sisi lain, dapat disadari bahwa terdapat risiko bahwa ada kemungkinan sektor swasta tidak selalu mempertahankan standar kualitas yang diperlukan ketika tidak ada pengawasan yang memadai dari pemerintah. Privatisasi dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses layanan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu secara finansial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menyerahkan layanan kepada sektor swasta tanpa kendali, tetapi juga memastikan adanya regulasi dan kerangka kebijakan yang mampu mengatur standar layanan, harga, serta jaminan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberadaan sektor swasta dalam pelayanan publik harus diposisikan sebagai mitra strategis, bukan sebagai pengganti total peran pemerintah. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang mungkin tidak memiliki daya beli yang cukup. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi silang atau kemitraan publik- swasta (*public-private partnership/PPP*) dapat menjadi alternatif solusi untuk menjembatani kebutuhan efisiensi

sekaligus menjamin keadilan akses. Pendekatan yang seimbang antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial, privatisasi dapat menjadi instrumen yang mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik. Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan yang tepat, privatisasi justru berisiko memperburuk kualitas layanan dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kunci keberhasilan privatisasi terletak pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi secara konsisten dan profesional.

1.10 Teori Holistic Governance

Teori *Holistic Governance* memperkenalkan konsep, bahwa pemerintahan melibatkan berbagai aktor, tidak hanya aspek negara, tetapi juga termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan. Teori ini menekankan pada pentingnya mengelola pemerintahan dan kebijakan publik dari perspektif menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kompleksitas dalam tata kelola publik melalui integrasi berbagai dimensi dan perspektif yang berbeda. Konsep utama dalam teori *holistic governance* yang dikemukakan (Perri 6, 1997) dalam (Zealand, n.d.) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sistemik dan Terintegrasi

Pendekatan sistemik yang mengintegrasikan berbagai elemen dan aspek dari tata kelola dapat digunakan untuk memahami pemerintahan dan kebijakan publik. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk menangani masalah kompleks melalui cara yang holistik, dengan melibatkan berbagai aktor dan faktor dalam sistem pemerintahan dan masyarakat.

2. Pengelolaan Kompleksitas

Pemerintah berusaha mengelola kompleksitas yang timbul dari interaksi antara berbagai aktor, kebijakan, dan sistem dalam pemerintahan. Mempertimbangkan dinamika kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, maka akan

meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem pemerintahan.

3. Interaksi antara Sektor Publik, Swasta dan Masyarakat

Interaksi ini menekankan bahwa dalam pengelolaan kebijakan dan layanan publik diperlukan interaksi dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengelolaan dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan dengan mendorong sinergi antara berbagai sektor yang berkontribusi.

4. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Publik

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Pendekatan Berbasis Bukti

Penggunaan data dan bukti dalam proses pengambilan keputusan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan serta dengan mengandalkan informasi yang berbasis bukti maka akan meningkatkan kualitas keputusan dan efektivitas kebijakan.

Beberapa poin yang disampaikan menyatukan dimensi sistemik, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam satu kerangka tata kelola yang utuh. Ini bukan hanya soal koordinasi antarsektor, melainkan tentang pengelolaan kompleksitas secara dinamis dengan melibatkan berbagai aktor negara, swasta, dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan melalui partisipasi publik yang bermakna dan informasi yang valid. Menilik kondisi saat ini, mengingat tantangan pemerintahan modern seperti perubahan iklim, disrupsi digital, krisis kesehatan, dan ketimpangan sosial yang bersifat multidimensional dan saling terkait, pendekatan holistik memungkinkan pemerintah membangun tata kelola yang adaptif, responsif, dan kolaboratif, sambil memastikan bahwa keputusan diambil dengan landasan

data yang kuat dan partisipasi publik yang luas untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Mengadopsi teori *holistic governance*, pemerintah diharapkan tidak lagi bekerja secara terpisah dalam silos birokrasi, tetapi mampu membangun jejaring kerja lintas sektor yang kolaboratif. Koordinasi lintas lembaga dan integrasi kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, peran teknologi informasi juga sangat penting dalam menyediakan data yang akurat serta mempercepat proses koordinasi antar aktor yang terlibat, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil yang memiliki nilai inklusivitas dalam proses pemerintahan. Ketika berbagai kelompok masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih tinggi karena adanya rasa memiliki dari masyarakat. Partisipasi yang aktif tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang mampu menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan akuntabilitas publik secara menyeluruh.

Akhirnya, *holistic governance* menawarkan suatu kerangka kerja yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis. Dalam dunia yang terus berubah cepat, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas untuk belajar secara berkelanjutan, menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan data dan kondisi riil di lapangan. Pemerintahan tidak hanya menjadi lebih responsif, tetapi juga mampu menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang melalui kolaborasi yang erat dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, penerapan *holistic governance* juga menuntut adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan dari pendekatan yang bersifat sektoral menuju pendekatan yang lebih terintegrasi. Hal ini mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada target institusionalnya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sektor lain secara lebih luas. Dengan demikian, proses perencanaan dan implementasi kebijakan publik perlu dirancang

secara sinergis melalui mekanisme koordinasi yang efektif, berbagi informasi, serta penyelarasan tujuan antarinstansi. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, A. R. H., Maharani, A. E., & Qori, A. L. (2021). Kebijakan publik sebagai keputusan moral. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.59>
- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adekamwa, M., Mursalim, & Indrayanti. (2024). Tren penelitian pelayanan publik di Indonesia: Suatu tinjauan sistematis literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 30(1), 1–30.
- Adolph, R. (2016). *Pelayanan publik Nomor 8 Tahun 2013*. Agastha, S., & Fikri, R. (2024). Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital desa (Digides) di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(4), 579–589.
- Agastha, S., & Fikri, R. (2024). Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital desa (Digides) di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(4), 579–589.
- Ahmad Mustamir, A., Hendrayadi, A., & I. H. (2023). *Teori administrasi publik pengantar*. Dalam *Administrasi negara publik*.
<https://books.google.com/books?id=vPsAEAAAQBAJ>
- Aisyah, N., Risna, D., Aiyub, & Sufi. (2024). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 10,

- 180–192. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i2.250>
- Aiyub, D., Muhammad, D., Suzanna, E., & Si, M. (2022). *Memapar teknik memperlakukan data*. https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/327/1/Buku_Referensi_Memahami%20Analisis%20Kualitatif.pdf
- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi birokrasi di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 187–199. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>
- Akbar, M. (2015). Penerapan prinsip-prinsip New Public Management dan governance dalam reformasi administrasi. *Reformasi*, 5(2), 1–17.
- Akmal, M. (2023). Governance network pada implementasi kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.
- Alamsyah Anggriani. (2016). Perkembangan paradigma administrasi publik. *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik*, 4(2), 1–28.
- Alfiady, T., Ibrahim, Z., & Dewi, R. (2015). Assessment of development, bureaucracy, administration, political disorder and military in Indonesian's transition. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 3(10), 206–208. <https://repository.unimal.ac.id/3604/1/Pol%20Disorder.pdf>
- Amin, A. (2024). Analisis pelayanan berbasis New Public Service di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu.
- Amru, N. F., Wijaya, A. F., & Dinata, C. (2023). Collaborative governance plus multi-helix model for poverty alleviation in the Rokan Block: Lessons from the Indonesian oil and gas industry. 8(1), 1–9.
- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi*, 11(2), 129–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>

- Apriliya, A., Muluk, M. R. K., & Mindarti, L. I. (2024). Inovasi pelayanan publik di era new normal (Studi tentang transformasi pelayanan SINANTI di DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep). 6(7), 415–422. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216719/>
- Arifin, N. (2020). Pemikiran pendidikan John Dewey. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 168–183.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif publik*.
- Bahrum. (2013). Ontologi, epistemologi dan aksiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 35–45.
- Bennet, J., & Neuman, M. J. (2007). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Dalam *Early childhood education: An international encyclopedia*. <https://doi.org/10.4324/9781315832685-107>
- Bennet, J., & Neuman, M. J. (2007). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Dalam *Early Childhood Education: An International Encyclopedia*. <https://doi.org/10.4324/9781315832685-107>
- Bertens, K. (2020). Pengantar filsafat. *Indonesian Journal of Theology*, 8(1), 110–113.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Carista Noor Sasi Ramadhania, C. N. S., Baiti, N., & H. (2024). Pengaruh etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik pada instansi pemerintah. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(6).
- Carpenter, R. (1994). Inventory investment internal-finance fluctuation.
- Chandra, D. (2022). Manajemen pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(1), 54–61. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i1.726>
- Daniguelo, A. (2020). Ontology in public administration includes potential, positivism and rationalism approaches. *Journal La Sociale*, 1(6), 41–46. <https://doi.org/10.37899/journal->

la-sociale.v1i6.209

- Dewi, R., & Alfiady, T. (2023). Pelayanan sistem rujukan online bagi pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Mutiara Barat Kabupaten Pidie. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 1, 1–10.
- Dewi, R., & Ayuda, M. I. (2022). Implementasi kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Kota Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 8(2), 108–120. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i2.142>
- Dewi, R., & Syahidah, A. N. (2024). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 10, 180–192. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i2.250>
- Dewi, R., Fikri, M. H., Hadian, A., & Rahmat, M. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Muhammadiyah Mandala By Pass Medan. 22(3), 1717–1720. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2774>
- Dong, L. (2021). Teori administrasi publik: Rasionalitas instrumental dan nilai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dong, L. (2024). *Administrasi publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eka Saputri, T. (2024). Penerapan etika pelayanan publik terkait administrasi kependudukan di Kelurahan Ngagel Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 293–303.
- Fajar, T. S. (2018). Morfologi filsafat administrasi. http://digilib.uinsgd.ac.id/35206/6/Fajar%20Tri%20Sakti_Morfologi%20Filsafat%20Administrasi.pdf
- Fauzan, N. I., Fadillah, M., Muhammad, W., Septiani, P., & Rachmat, D. A. (2023). Seni memerintah yang efektif kaitannya dengan ontologi administrasi publik. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 219–229.

- <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i2.623>
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika otonomi daerah di Indonesia*. Unimal Press.
- Frederickson, H. G. (2003). *The public administration theory primer*. <https://doi.org/10.5860/choice.41-2423>
- Goss, R. P. (1996). A distinct public administration ethics? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 6(4), 573–597.
<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024328>
- Hajer, M. (2018). Doing discourse analysis: Coalitions, practices, meaning.
- Haning, M. T. (2019). Reformasi birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari perspektif administrasi publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>
- Hanjani, A., & Muslim, M. A. (2024). Implementasi reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 1–15.
<https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.21257>
- Hasyem, M., Ferizaldi, F., Syamsuddin, S., & Tarmidi, T. (2022). Bureaucratic reform resistance in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3(1), 57–68.
<https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6265>
- Imanuel Jaya. (2021). Perjalanan panjang ilmu administrasi publik (Dari paradigma klasik menuju kontemporer). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371>
- Irmawati. (2019). Model tata kelola pemerintahan kolaboratif (Collaborative Governance) dalam penyelenggaraan pelayanan publik [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Ismaya, N., Mustafa, L. O., & Jopang, J. (2022). Efektivitas pelayanan publik diukur dengan pendekatan teori sistem pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 99–107.

- Kairupan, J. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Teknik Informatika*, 3(2), 33–40.
- Kamaruddin, S. (2016). Administrasi dan pelayanan publik: Antara teori dan aplikasinya. Ombak.
- Kardiati, D., Hafiz, A., Jamiati KN, Y. S. Isma, S. Chairunnisak, S. K. Fadhillah, & F. Akmal. (2025). Integrasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik: Studi evaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. *Journal of Informatics and Computer Science*, 11(1), <https://doi.org/10.33143/jics.v11i1.4836>
- Kardina, M., & Ofianto, O. (2023). Kontribusi epistemologi filsafat ilmu dalam meminimalkan bias dalam pengambilan keputusan administrasi negara. *Innovative: Journal of Social Science ...*, 3, 3296–3305.
- Keban, Y. T. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (1995). *Teori-teori klasik dan neoklasik*.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Buku ajar pengantar metode penelitian*. FSH UIN Jakarta.
- Madjid, U. (2011). Ilmu administrasi ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. *Visioner*, 5(3), 374–394. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/541>
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Mutmainah, A., & Puspitasari, M. T. (2024). Filsafat administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 603–614.
- Maro'ah, S. (2008). Kebijakan privatisasi dan pengaruhnya dalam perekonomian makro Indonesia. *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 9, 1.
- Mufiz, A. (2016). Pengertian dasar administrasi publik. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, 63.
- Muharam, & Satia, R. (2019). Inovasi pelayanan publik dalam

- menghadapi era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Muhyadi, M. (2015). Teknik pengambilan keputusan. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Mukhlisin, M., & Dewi, R. (2023). Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 372. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.10788>
- Murniati, M., Suryani, M., & Fitria, P. (2018). Hubungan response time perawat dengan kepuasan pasien di IGD RS Cibabat. *Jurnal Kesehatan Budi Luhur*, 11(1), 15–19. <https://doi.org/10.62817/jkbl.v11i1.121>
- Nabila, N., Berutu, A. T., & Tambunan, N. F. A. (2023). Filsafat ilmu di era globalisasi. *Hibrul Ulama*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i1.506>
- Nadjib, A. (2016). *Buku ajar teori administrasi publik*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis praktik*. Airlangga University Press.
- Nuriman, Azhar, Aiyub, Yusnaini, & Yuliza. (2023). Pemberdayaan manajemen organisasi pada Dayah Nurul Yaqin Kecamatan Darul Ihsan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(1), 33–38.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of public policy*. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
- Puncak Joyontono, et al. (1967). Determinan lama mencari kerja lulusan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.
- Putri, N. A. D. (2016). Dinamika reformasi birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 161–191.
- Rabu, R., & Abra, E. H. (2021). Reformasi di bidang birokrasi untuk mewujudkan good governance dalam hukum kebijakan publik. *Petita*, 3(2), 204–218. <https://doi.org/10.33373/>

pta.v3i2.3827

- Rahman, B., Akmal, M., Muzaffarsyah, T., Zuhilmi, Hidayat, B., & I. (2023). Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 4(1), 356–366. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47058>
- Renwarin, P. R. (2020). Filsafat, teologi dan pemajuan kebudayaan. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.53396/media.v1i1.5>
- Riyadi, R. (2008). Reformasi birokrasi dalam perspektif perilaku administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi STIA Bandung*, 4(2), 110–119.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2019). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector.
- Safitri, E., Yoana, L., Yani, R., & Hayani, R. N. (2022). Pengertian, objek dan ruang lingkup filsafat, filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 5398–5404.
- Sawir, M. (2021). Ilmu administrasi dan analisis kebijakan publik: Konseptual dan praktik. Yogyakarta: Deepublish.
- Shafwah, N., & Sianturi, R. N. (2024). Ontologi sosial dalam konteks administrasi publik: Implikasi bagi pengembangan kebijakan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1036–1044. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.982>
- Subirats, J. (2001). Public policy analysis. *Gaceta Sanitaria*, 15(3), 259–264. [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(01\)71557-9](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9)
- Suripto, & Sudarmadi. (2022). Effect of liquidity, earnings management, and tax avoidance on tax aggressiveness of manufacturing companies in Indonesia. <https://doi.org/10.2478/9788366675827-032>
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi birokrasi dan pemenuhan hak warga dalam mengakses pelayanan publik melalui Mal

- Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>
- Tanjung, F. H. (2022). Penerapan teori administrasi publik dalam keberlanjutan pengelolaan IPAL komunal di Jakarta. *Reksabumi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2922.2022>
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Waldo, D. (2007). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration* (Expanded ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. (Karya asli diterbitkan tahun 1948)
- White, L. D. (1955). *Introduction to the study of public administration* (4th ed.). New York, NY: Macmillan.
- Widanti, N. (2022). *Buku ajar prinsip administrasi publik* (Ed. UNR Press). Jagat Langit Sukma.
- Wijaya, B., & Dewi, R. (2022). Pengaruh pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Arifamart Kota Lhokseumawe. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(2), 189. <https://doi.org/10.29103/njiab.v5i2.8302>
- Yuningsih, T., et al. (2018). *Etika administrasi sektor publik*. Media Sains Indonesia.
- Yuningsih, T., Susniwati, S., Herawati, A. R., Larasati, E., et al. (2023). Etika administrasi publik sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi birokrasi. 13, 301–310.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi birokrasi Indonesia: Peluang dan hambatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>
- Zealand, N. (n.d.). Holistic governance: Integration of value and instrumental rationalities.

Zega, Y. (2018). Analisis penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 99–104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.24>

PROFIL PENULIS



Risna Dewi, S.Sos., M.S.P., merupakan seorang akademisi di bidang Administrasi Publik yang lahir di Loskala pada Februari 1982. Ia saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Sejak bergabung sebagai tenaga pendidik pada tahun 2008, Risna Dewi secara konsisten berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada bidang Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2006. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mendorongnya untuk melanjutkan studi pada Program Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2011. Latar belakang keilmuan tersebut membentuk perspektif akademiknya yang kuat dalam menganalisis berbagai isu pembangunan, kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan.

Dalam perjalanan akademiknya, Risna Dewi aktif melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah yang berfokus pada bidang Administrasi Publik, khususnya terkait kebijakan, pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial dalam pembangunan daerah. Melalui

karya-karyanya, ia berupaya memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi pemerintahan. Sebagai seorang pendidik, Risna Dewi dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam membimbing dan menginspirasi mahasiswa. Ia mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan publik di masyarakat. Pendekatan pembelajaran yang reflektif dan kontekstual menjadikan proses akademik tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada praktik dan solusi nyata. Melalui peran akademiknya, Risna Dewi terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan ilmu Administrasi Publik di Indonesia. Bagi yang ingin berdiskusi atau berkolaborasi dalam bidang akademik dan penelitian, ia dapat dihubungi melalui surel: risna.dewi@unimal.ac.id



Depita Kardiati, S.Pd., M.Si. merupakan akademisi di bidang Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Lahir di Lamblang Manyang, Aceh Besar, pada 23 Juni 1992, ia menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya, ia melanjutkan studi Magister Ilmu Administrasi dengan peminatan Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Iskandar Muda Banda Aceh dan meraih gelar Magister pada tahun 2021. Sebagai dosen, Depita Kardiati aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berkomitmen menghadirkan proses pembelajaran yang interaktif, kritis, dan kontekstual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoretis, tetapi juga mampu menganalisis dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan administrasi publik secara komprehensif. Fokus penelitian dan pengabdian yang dijalankannya menekankan pengembangan ilmu administrasi publik yang berdampak pada praktik kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mencakup kajian pembangunan daerah, komunikasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai kontribusi akademik dan kegiatan pengabdian masyarakat, ia mendorong peningkatan literasi publik, penguatan kapasitas generasi muda, dan kesiapan menghadapi tantangan era digital. Dalam buku *Kapita Selekta Administrasi Publik* ini, Depita Kardiati menyajikan refleksi konseptual dan analisis kritis terhadap isu-isu strategis administrasi publik, yang diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus memperkaya pengetahuan dan praktik administrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Bagi yang ingin berinteraksi lebih lanjut, Depita Kardiati dapat dihubungi melalui surel: **depita@unimal.ac.id**.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut aparatur dan akademisi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, kritis, dan kontekstual terhadap berbagai isu kontemporer. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran konseptual sekaligus analisis terhadap berbagai tema strategis dalam administrasi publik, baik dari perspektif teoritis maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini dirancang secara sistematis agar dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa dalam memahami isu-isu pilihan (selected issues) dalam administrasi publik. Materi yang disajikan tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tetapi juga mendorong kemampuan analisis, sintesis, serta refleksi kritis terhadap fenomena kebijakan dan tata kelola publik di tingkat lokal, nasional, maupun global.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-311-5

